

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 8, Agustus 2024, Halaman 636-643
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13587961>

Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo

Jesicha Agnesia Pattipeilohy^{1*}, Fenti Prihatini Tui¹, Romy Tantu¹

¹Universitas Negeri Gorontalo
*Email: jejesica422@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penanganan parkir di Kota Gorontalo, yang ditinjau berdasarkan aspek organisasi pelaksana, interpretasi dan aplikasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanganan parkir di Kota Gorontalo belum optimal, hal ini dapat ditinjau pada dimensi organisasi yang belum optimal karena dalam penyelenggaraan parkir belum ditunjang oleh sarana yang memadai; dari dimensi interpretasi belum berjalan optimal karena belum memiliki Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum; serta dari dimensi aplikasi belum optimal karena masih sering ditemukannya ketidaksesuaian pemungutan tarif berdasarkan peraturan daerah.

Kata Kunci: Kebijakan; implementasi; Pemerintah; Penanganan Parkir; pelayanan

Abstract

This research aims to find out the government policy in handling parking in Gorontalo City, which is reviewed based on the aspects of implementing organization, interpretation and policy application. The research method used is a qualitative approach with descriptive research type, with data collection techniques, observation, interviews and documentation. Based on the research results, it shows that the parking management policy in Gorontalo City is not optimal, this can be seen in the organizational dimension which is not optimal because the implementation of parking has not been supported by adequate facilities; from the interpretation dimension it has not been running optimally because it does not yet have a Technical Guideline for Implementing Parking on the Side of Public Roads; and from the application dimension it is not optimal because there are still frequent inconsistencies in tariff collection based on local regulations.

Keywords: Policy; Implementation; Government; Parking Management; Service

Article Info

Received date: 10 Agustus 2024

Revised date: 18 Agustus 2024

Accepted date: 28 Agustus 2024

PENDAHULUAN

Penelitian ini secara teori dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman, khususnya dalam bidang kajian Ilmu Administrasi Publik yang secara spesifik berfokus pada studi implementasi kebijakan public. Kemudian secara praktik, dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Kota Gorontalo dan Dinas Perhubungan Kota Gorontalo.

Transportasi begitu penting dalam mendukung mobilitas sehari-hari, sehingga penggunaan moda transportasi dalam era kontemporer, tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas setiap manusia. Hal ini yang kemudian meningkatkan pertumbuhan transportasi dari hari ke hari, terlebih pada setiap pusat kota yang dasarnya menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Gorontalo khususnya moda transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat Kota Gorontalo dalam aktivitasnya, perlu diimbangi dengan tata

kelola yang baik oleh pemerintah daerah, agar lalu lintas di Kota Gorontalo dapat mewujudkan ketertiban, kenyamanan, serta kondisifitas para pengguna jalan.

Salah satu upaya pemerintah daerah Kota Gorontalo dalam penyelenggaraan tata kelola lalu lintas adalah melalui pengelolaan parkir. Adapun pendekatan yang digunakan oleh pemerintah adalah pendekatan melalui regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir yang mengatur tentang pelaksanaan parkir di wilayah administratif Kota Gorontalo berdasarkan tempat parkir dan pengelolanya berdasarkan ketetapan Walikota Gorontalo.

Pelaksanaan Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dimuat dalam undang-undang tentang Pemerintahan daerah yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritasnya. Aparat Pemerintah Daerah memegang peranan yang strategis dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Tujuan Otonomi Daerah dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan daerah yang direncanakan dengan realistis serta dilaksanakan secara bertahap dan sungguh-sungguh. Otonomi Daerah hanya dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna di bawah pimpinan pemerintah yang stabil dan berwibawa serta didukung dengan hasil maupun kemampuan pelaksana dari pegawai pemerintah yang maksimal. Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah tergantung pada kemampuan pelaksana Daerah. Hal ini perlu disadari bahwa Otonomi Daerah yang telah direncanakan dengan baik tidak akan tercapai tanpa dukungan publik dan kemampuan pelaksana pemerintah Daerah terutama di dalam usaha untuk menghimpun dana secara wajar dan tertib termasuk penggalan sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional melalui pemungutan dengan berbagai sumber-sumber pendapatan asli Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota-Walikota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo, dimana organisasi yang berperan dalam peningkatan PAD diantaranya adalah Dinas Perhubungan Informasi Dan Telekomunikasi Kota Gorontalo Bidang Perhubungan Darat Seksi Sarana dan Prasarana Perparkiran. Pemilihan jenis retribusi parkir sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Informasi Dan Telekomunikasi Kota Gorontalo untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan Daerah dipandang tepat, bila dilihat dari beberapa keunggulan dari pemungutan jenis retribusi ini dibandingkan dengan pungutan pajak Daerah atau sumber-sumber lainnya. Ada beberapa keunggulan retribusi parkir dibandingkan dengan pajak Daerah. Keunggulan tersebut antara lain:

- 1) Diboleh-kannya pungutan di lapangan retribusi, sedangkan pajak Daerah tidak boleh,
- 2) Adanya pemberian jasa atau kontrapretasi,
- 3) Retribusi dibayar oleh siapa saja yang telah menggunakan jasa atau mengenyam jasa dari pemerintah Daerah, pajak Daerah di bayar oleh orang-orang tertentu yaitu para wajib pajak antara
- 4) Pemungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali sepanjang dipergunakannya jasa pelayanan dan biasanya tidak diangsur pembayarannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa hasil dari pemungutan retribusi parkir merupakan dana yang potensial untuk pendapatan Daerah guna pembiayaan pembangunan. Retribusi parkir ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011. Retribusi parkir termasuk sumber pendapatan Daerah yang ideal bagi pembangunan. Dari hasil pemungutan retribusi parkir yang telah ditentukan dari pemerintah, diharapkan dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga dalam melaksanakan pembangunan di Daerah akan lancar karena tersedianya dana khususnya yang berasal dari retribusi parkir. Namun kenyataannya, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir belum dikelola dengan baik sebagaimana yang diharapkan, sehingga akan mengurangi pemasukan dari hasil pemungutan retribusi parkir tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengaturan parkir yang dilakukan pemerintah daerah dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Kota Gorontalo dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dalam pengelolaan dan pengembangan sistem transportasi di Kota Gorontalo. Adapun dalam penyelenggaraan parkir di tempat parkir tepi jalan umum, Dishub Kota Gorontalo berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2019

menggunakan pihak ketiga dalam pelaksanaannya. Dimana pihak ketiga tersebut memiliki izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dengan petugas Juru Parkir.

Tata kelola penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan diharapkan dapat menjamin lalu lintas di Kota Gorontalo beroperasi secara positif, efektif dan efisien, serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab atau berdasarkan peraturan yang berlaku, dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, dari pengamatan peneliti, kebijakan ini belum berjalan dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian yang sebelumnya dilakukan. Dimana ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai, sistem pengelolaan yang belum dilakukan dengan baik, serta penerapan tarif parkir yang berbeda-beda atau tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku. Sehingga implementasi kebijakan pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum Kota Gorontalo, belum maksimal dilaksanakan. (Sulila, 2014)

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan pemerintah dalam penanganan parkir di Kota Gorontalo, sebagaimana yang dimaksudkan bahwa pendekatan kualitatif pendekatan ini digunakan untuk dapat memahami objek penelitian secara alamiah dan peneliti menjadi instrumen kunci, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi, analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, serta hasil penelitian berorientasi pada penekanan makna disbanding melakukan generalisasi. (Sugiyono, 2017: 9)

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana peneliti berusaha menemukan pemecahan masalah dengan mendeskripsikan (menjelaskan) obyek penelitian secara apa adanya. Sebagaimana dimaksudkan melalui penelitian deskriptif, peneliti memiliki maksud untuk memberikan gambaran atau menerangkan suatu gejala. (Arikunto, 2016: 250)

3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam pelaksanaan penelitian:

1) Tahap Persiapan

- Tahap persiapan merupakan langkah awal dari suatu penelitian, pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu:
- Menentukan titik lokasi Tempat Parkir pada Tepi Jalan Umum yang direncanakan;
- Pengumpulan bahan, baik dalam bentuk observasi, literatur yang relevan, serta wawancara awal.
- Penyusunan proposal penelitian yang telah dikonsultasikan dengan pembimbing dan diseminarkan.
- Menetapkan waktu penelitian berdasarkan materi yang akan diteliti,
- Permohonan izin penelitian,

2) Tahap Pelaksanaan

Tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian meliputi:

- Pengajuan pelaksanaan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, setelah menerima surat izin penelitian dari Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo.
- Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik analisis data dalam bentuk, wawancara mendalam (*depth interview*) bersama para informan, serta pengambilan dokumentasi dalam bentuk dokumen atau data sekunder lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.
- Pelaksanaan analisis data, berdasarkan model analisis data yang telah ditetapkan.

3) Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Penyusunan laporan dapat dilaksanakan dengan pelaksanaan analisis data yang sudah dilakukan serta pengecekan keabsahan data yang akan digunakan, dan melakukan konsultasi secara intens dengan Dosen Pembimbing.

4. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrumen kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. (Moeloeng, 2007: 87)

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Gorontalo dan beberapa titik lokasi Tempat Parkir pada Tepi Jalan umum di Kota Gorontalo. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai pelaksanaan parkir pada Tepi Jalan Umum.

5. Data dan Sumber Data

Data yang dimaksud pada penelitian didasarkan pada kajian penelitian yang berfokus pada Kebijakan Pemerintah dan Penanganan Parkir di Kota Gorontalo. Bungin mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif jenis data terdiri dari dua bentuk yaitu: (1) data kasus yaitu data yang hanya menjelaskan kasus-kasus tertentu, dalam arti, data kasus berlaku untuk kasus tersebut serta tidak digeneralisasikan dengan kasus lain dengan radius yang lebih luas. Data kasus lebih luas dan komprehensif dalam menggambarkan sebuah obyek penelitian, selain itu juga data kasus mempunyai area yang luasnya tergantung pada seberapa besar penelitian kualitatif itu. (Bungin, 2015: 25)

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat disebut sebagai data utama. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua (Mulyadi, 2016: 144). Di dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara. Sedangkan data sekunder akan diambil dari dokumen, observasi, foto, data serta penelitian terdahulu yang relevan.

1) Sumber Data Primer

Data primer dapat diperoleh melalui observasi secara langsung pada lokasi penelitian dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari penelusuran dokumen-dokumen, penelitian atau literatur yang relevan dengan topik penelitian.

6. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat memperoleh data yang digunakan dalam penelitian, berikut teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini:

1. Observasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh pengamatan secara langsung terhadap peristiwa/fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat mempelajari perilaku dan juga makna dari perilaku tersebut.

2. Wawancara

Melalui wawancara penelitian akan memperoleh informasi mendalam terkait fokus penelitian, agar dapat memudahkan peneliti dalam melakukan interpretasi.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan penting yang sudah berlalu, baik itu dalam bentuk tulisan atau pun gambar. Melalui dokumentasi maka menjadi data pelengkap dalam penyusunan penelitian yang dilakukan.

7. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data melalui observasi, wawancara dan juga dokumentasi, proses yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Berikut beberapa tahapan analisis data: (Sugiyono, 2019: 322–325)

1. Reduksi Data
Mereduksi data adalah suatu proses perangkuman dengan memilih data yang diperlukan dalam penelitian atau data-data yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian, melalui tahapan ini data yang diperoleh akan memberikan gambaran jelas kepada peneliti.
2. Penyajian Data
Dalam pendekatan kualitatif, dari data-data yang telah diolah atau dianalisis sebelumnya akan disajikan dalam bentuk teks dengan sifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.
Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis data, di mana berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka penarikan simpulan yang dilakukan akan menghasilkan simpulan dalam bentuk deskripsi atau gambaran dari suatu obyek.

8. Pengcekan Keabsahan Data

Untuk dapat memastikan data hasil penelitian dapat dikatakan valid, maka dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data triangulasi. Dimana sebuah teknik pengumpulan data dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang tersedia. Maka sebenarnya peneliti melakukan pengumpulan data sekaligus pengujian kredibilitas data. (Sugiyono, 2017: 125)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan parkir merupakan upaya untuk melakukan penataan parkir dengan tujuan untuk dapat mewujudkan efisien pada siklus lalu lintas, dengan tidak menimbulkan suatu permasalahan lalu lintas yang kompleks. Penataan parkir juga merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan akan mobilitas yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Pemerintah Kota Gorontalo dalam upaya penyelenggaraan parkir menggunakan Peraturan Daerah sebagai instrumen kebijakan dalam penanganan parkir di Kota Gorontalo. Kebijakan ini dilakukan untuk dapat mewujudkan sistem lalu lintas yang kondusif, memberikan pelayanan jasa parkir untuk masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara teknis, melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir, sebagai instrumen kebijakan utama dalam tata kelola parkir di Kota Gorontalo, dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa: *Penyelenggaraan parkir bertujuan untuk mengarahkan keberadaan parkir agar dapat beroperasi secara positif, berdayaguna dan berhasil guna serta bertanggungjawab atas kewajibannya.*

Melalui regulasi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Gorontalo melalui Dinas Perhubungan Kota Gorontalo bertindak sebagai implementor dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan parkir di Kota Gorontalo. Uraian pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan penanganan parkir di Kota Gorontalo, dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan oleh Jones (dalam Tahir, 2014:81) yang menyatakan bahwa suatu kebijakan dalam implementasinya dipengaruhi oleh tiga aktifitas utama, yaitu: organisasi, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Gorontalo yang ditinjau dari penataan sumber daya dan unit kerja untuk dapat melaksanakan kebijakan; interpretasi atau penafsiran dari kebijakan, dalam hal ini adalah kemampuan menafsirkan peraturan dalam bentuk pengarahan untuk dapat melaksanakan kebijakan; aplikasi (penerapan), sebagai bentuk aktualisasi atau relaisasi dari hasil pengarahan yang sebelumnya telah dilakukan. adapun uraian tiga aktifitas tersebut berdasarkan hasil analisis temuan penelitian, pendekatan konseptual, dan juga dukungan pustaka, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi

Organisasi dalam definisi umum diartikan sebagai tempat yang memiliki susunan sekelompok orang secara hirarkis, terikat oleh peraturan, serta memiliki tujuan utama. Dalam definisi

kebijakan, organisasi diartikan sebagai implementor suatu kebijakan, yang menjalankan kebijakan, baik dari implementasi, pengawasan dan juga evaluasi suatu kebijakan.

Dinas Perhubungan Kota Gorontalo merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki otoritas dalam menyelenggarakan tata kelola mobilisasi publik. Dalam penyelenggaraan parkir, Dinas Perhubungan Kota Gorontalo melaksanakan kebijakan penanganan parkir dengan menugaskan Unit Kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagai pelaksana teknis kebijakan. Penyelenggaraan parkir yang ditinjau berdasarkan dimensi organisasi yang berfokus pada penataan sumber daya organisasi, yang dalam hal ini adalah sumber daya manusia atau petugas dan koordinator parkir, serta sumber daya organisasi berupa sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kebijakan parkir.

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan teoritis penyelenggaraan parkir di Kota Gorontalo yang ditinjau melalui dimensi organisasi dapat disimpulkan belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh penataan keterbatasan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Gorontalo untuk memaksimalkan penyelenggaraan parkir pada Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum. Keterbatasan tersebut dapat dilihat dari minimnya atribut yang dimiliki oleh Juru Parkir, seperti rompi *safety*, *id card* atau tanda pengenal, serta alat pungut (karcis parkir).

Adapun dalam unsur lain seperti petugas dari Dinas Perhubungan Kota Gorontalo dianggap sudah memadai dalam menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi berkala, serta juru parkir (petugas parkir) sudah sesuai dengan kebutuhan wilayah parkir, yakni dalam hal wawancara menunjukkan pada setiap titik parkir terdapat 3-4 orang Juru Parkir yang beroperasi berdasarkan *shift* dengan waktu 5-6 jam operasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan penataan kembali khususnya dalam sumber daya organisasi berupa sarana yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jones (dalam Tahir, 2014: 81) bahwa aktifitas organisasi yang dimaksud adalah penataan sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang program dapat berjalan.

Hal ini juga selaras dengan penelitian oleh Christianingsih (2020), bahwa dimensi organisasi memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi suatu kebijakan. Serta, implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Minimnya sarana dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, sebagaimana temuan oleh Sulila (2014), bahwa dalam implementasi kebijakan parkir di Kota Gorontalo belum optimal karena tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

2. Interpretasi

Dalam implementasi kebijakan kemampuan interpretatif dari suatu kebijakan merupakan aktifitas penting, dalam bentuk penjabaran suatu kebijakan ke dalam langkah-langkah teknis untuk kemudian dapat diimplementasikan. Dalam pandangan Jones (dalam Tahir, 2014:81) aktifitas interpretasi (penafsiran) didefinisikan sebagai menafsirkan program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

Kebijakan penanganan parkir di Kota Gorontalo yang ditinjau berdasarkan dimensi interpretasi dapat disimpulkan belum maksimal. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian, bahwa dalam menjalankan tugas untuk penyelenggaraan parkir di Kota Gorontalo, Dinas Perhubungan Kota Gorontalo hanya mengacu pada instrumen utama, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir, sementara penjabaran teknis mengenai kebijakan tersebut dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Parkir, belum dilakukan penyusunan dan penetapan. Kondisi ini menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan, karena tidak adanya panduan teknis dalam penataan parkir yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas oleh Dinas Perhubungan Kota Gorontalo.

Urgensi SOP atau pun Petunjuk Teknis selaras dengan temuan penelitian oleh Ardiansyah, et.al. (2016) yang menyatakan bahwa dalam penataan parkir perlu ditunjang oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dalam penerapan kebijakan dapat berjalan secara efektif.

Adapun dalam aspek pengarahan, telah dijalankan dengan baik, dengan dibuktikan oleh hasil penelitian, bahwa Dinas Perhubungan Kota Gorontalo telah melakukan penyuluhan secara berkala pada setiap bulan dengan menghadirkan *stakeholder* yang memiliki kompetensi dalam memberikan pengarahan kepada petugas lapangan, koordinator parkir dan juru parkir.

3. Aplikasi (Penerapan)

Aplikasi sebagai bagian dari aktifitas implementasi kebijakan, dinilai sebagai bagian terakhir dari suatu kebijakan. Menurut Jones (dalam Tahir, 2014: 81) aktifitas aplikasi (penerapan) adalah pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Dalam kajian penelitian ini, aktifitas aplikasi yang dimaksud adalah pelaksanaan kegiatan rutin dalam bentuk penyediaan jasa atau layanan parkir pada Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Gorontalo, oleh Dinas Perhubungan Kota Gorontalo melalui kerja sama dengan koordinator tempat parkir. Dimensi aplikasi ini ditinjau berdasarkan indikator pencapaian dan kesesuaian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan parkir.

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan tinjauan teoritis, kebijakan penanganan parkir di Kota Gorontalo yang ditinjau pada dimensi aplikasi, dapat disimpulkan belum berjalan maksimal. Karena, ketercapaian dan kesesuaian antara kebijakan tentang penyelenggaraan parkir masih belum optimal, yang dibuktikan dengan ketidaksesuaian tarif parkir yang dilakukan pungutan oleh pengelola dengan ketentuan tarif parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir Pada Tepi Jalan Umum.

Ketidaksesuaian tarif parkir antara ketentuan pada peraturan daerah dan penerapannya di lapangan, menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penerapan kebijakan parkir di Kota Gorontalo. Temuan ini juga ditunjang oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulila (2014), dimana penerapan tarif parkir yang tidak sesuai menjadi kendala yang dihadapi dalam implementasi pelayanan parkir di Kota Gorontalo. Adapun dalam penelitian oleh Howay et al., (2021) menyatakan bahwa dalam penerapan retribusi parkir di Kota Gorontalo masih banyak ditemukan ketimpangan, dimana tarif yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Layanan Parkir di Tepi Jalan Umum, tidak sesuai dengan pemungutan yang dilakukan oleh Juru Parkir pada layanan parkir tepi jalan umum di Kota Gorontalo.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah dalam penanganan parkir di Kota Gorontalo belum dapat diimplementasikan dengan baik. Perihal tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian yang ditinjau berdasarkan aktivitas organisasi, interpretasi dan aplikasi, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dalam penanganan parkir di Kota Gorontalo yang ditinjau berdasarkan dimensi organisasi belum optimal. Karena dalam mengoptimalkan penyelenggaraan layanan parkir tidak ditunjang oleh sarana berupa atribut untuk Juru Parkir serta alat pungut (berupa karcis).
2. Kebijakan pemerintah dalam penanganan parkir di Kota Gorontalo yang ditinjau berdasarkan dimensi interpretasi belum optimal. Karena belum tersedianya panduan pelaksanaan layanan parkir di Tepi Jalan Umum, berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang menjadi acuan teknis dalam pelaksanaan tugas bagi Dinas Perhubungan Kota Gorontalo.
3. Kebijakan pemerintah dalam penanganan parkir di Kota Gorontalo yang ditinjau berdasarkan dimensi aplikasi belum optimal. Yang dibuktikan dengan ketidaksesuaian antara capaian penyelenggaraan parkir di Tepi Jalan Umum dengan aktualisasi di lapangan, seperti ketidaksesuaian tarif pungutan berdasarkan peraturan dan aktualisasi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ali, F., & Baharuddin. (2014). *Ilmu Administrasi dalam Pendekatan Hakikat Inti*. Pustaka Pelajar.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Ardiansyah, R., Sundarso, & Yuniningsih, T. (2016). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. *Jurnal Public of Policy*.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, (1996).
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2014). *Handbook of Public Policy Analysis (Theory, Politics, and Methods)* (I. Baihaqi (ed.); Dialihbaha). Nusa Media.
- Howay, N., Igrisa, I., & Isa, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Gorontalo. *UNG Repository*.
- Makausi, A. M., Sabijono, H., & Pinatik, S. (2019). Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 423–432. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26348.2019>
- Moeloeng, J. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Paneo, I., Kadji, Y., Zuchri, A., & Hiola, R. (2017). SMILE-Approach Model in Implementation of NHI Policy in North Gorontalo District. *Public Policy and Administration Research*, 7(11).
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Pub. L. No. 12 Tahun 2011 (2011).
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir, Pub. L. No. 2 Tahun 2019 (2019).
- Pratama, P., & Safitri, R. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang. *JSHP*, 4(2).
- Pujasetiandi, L. B. P., Diswandi, & Fadliyanti, L. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Dalam Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah. *Jurnal LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 19, 1–224.
- Setijowarno, D., & Frazila, R. B. (2001). *Pengantar Sistem Transportasi*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat Administrasi* (Revisi). Bumi Aksara.
- Sugandi, Y. S. (2011a). *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Graha Media.
- Sugandi, Y. S. (2011b). *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*. Ombak.
- Sulila, I. (2014). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 4 nomor 2, 1371.
- Syahida. (2014). *Teori dan Implementasi*. Penerbit Andi.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS.